

OTONOMI DAERAH: KAJIAN KESIAPAN DUNIA USAHA DAN BIROKRASI

Ihwan Susila

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Decentralization is the reflection of economic and politic reformation. The politic change in developing countries in the last decade shows the tendency that local government has the authority to public service in the local society. Due to technology change and integration in the global market, it is a big demand for the government to control the politic and economic system in the country. The regional autonomy has two different effects. The regional autonomy, however gives the opportunity to their districts to grow and develop their own districts. On the contrary, the regional autonomy can be worse. This occurs due to the lack of preparation of the district to apply the policy. The key to minimize or eliminate the problem is by enhancing the quality of human resources. Preparation of business and bureaucracy to face the regional autonomy will be discussed.

Keywords: *decentralization, preparing, quality of human resource, regional autonomy.*

PENDAHULUAN

Gejala perdagangan global, sebenarnya telah terasa mulai sekarang. Barang-barang konsumsi dalam negeri dibanjiri oleh produk luar negeri. Indonesia dengan penduduk lebih dan 200 juta jiwa merupakan lahan yang cukup potensial bagi pemasaran barang konsumsi luar negeri. Bukan mustahil jika pada era perdagangan bebas ASEAN tahun 2003 dan Asia Pasifik tahun 2020 nanti kita hanya sebagai tuan rumah yang baik, ramah dan akrab dengan barang-barang luar negeri. Seandainya Indonesia tidak siap, sangat mungkin pasar domestik akan lepas dari tangan pengusaha nasional. Dengan demikian masyarakat, pemerintah dan pengusaha harus mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan bebas.

Problem-problem fundamental ekonomi

tercermin dalam berbagai indikator ekonomi makro seperti rendahnya nilai tukar rupiah, laju inflasi yang tinggi, tingkat pengangguran yang melonjak, dan defisit neraca pembayaran, merupakan indikasi adanya kesalahan dalam manajemen makro ekonomi sekaligus tidak sinkronnya antara manajemen makro tersebut dengan manajemen mikro. Dalam konteks dan domain tersebut, Pemerintah harus berani mengambil peran penting dan menentukan untuk menciptakan arah yang jelas terhadap perkembangan ekonomi pada masa-masa yang akan datang. Selain itu, kecenderungan global ternyata menimbulkan berbagai perubahan yang nampaknya menjadi suatu keharusan yang secara tidak langsung terkait dengan fenomena ketenagakerjaan nasional. Pertama, tuntutan utama *capital intensive* yang mendukung proses percepatan produksi dan mampu memberikan

"value added" optimal dan (cenderung) meninggalkan "labor intensive" sehingga tuntutan dan kebutuhan SDM handal menjadi realitas utama. Kedua, kecenderungan *capital intensive* memacu iklim "globalisasi investasi" yang kemudian mendukung pemahaman ekonomi rasional tanpa mempertimbangkan batas wilayah sehingga maraknya tenaga kerja asing (*expatriate*) juga tidak terlepas dan tuntutan era global dan orientasi produktifitas. Selain soal monopoli, tantangan yang harus dihadapi Pemerintah yaitu bagaimana upaya untuk lebih "memandirikan" pelaku ekonomi swastanasional, termasuk dalam hal ini adalah orientasi untuk menyehatkan dan memandirikan BUMN dan Koperasi. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana agar mereka menjadi *world class* sehingga mempunyai *bargaining power* dalam percaturan perekonomian global yang semakin menuntut prinsip efisiensi-produktifitas di semua bidang. Keberhasilan sejumlah perusahaan swastanasional dalam meraih ISO pada dasarnya merupakan langkah awal untuk menuju gerbang perdagangan internasional yang menjanjikan banyak devisa dan hal ini menjadi agenda tersendiri bagi pemerintah untuk lebih memacu pada pencapaian standar mutu lainnya.

KESIAPAN

Kebijakan pemberian muatan lokal pada produk berstandar global akan memperkuat daya tembus pasar setempat. Konsep ini merupakan pengembangan dari pemikiran global bertindak lokal (*think globally act locally*). Konsep tersebut mencakup baik produk maupun pendekatan pemasaran dengan mengacu suatu keharusan untuk bermuatan lokal (*local content*) meskipun tujuannya untuk meraih pasar global. Untuk mempertahankan produk dan sekaligus menyelaraskan dengan selera lokal, apa yang dapat diglobalkan kualitasnya distandarkan secara global agar efisiensi tercapai. Sedangkan untuk menampung selera lokal maka produk tersebut harus di *customized*-kan agar membumi.

Untuk mencapai efisiensi di segala aspek pembangunan diperlukan dukungan politik dan peminat. Dukungan politik tersebut dapat tercipta jika kekuasaan politik dipegang oleh birokrat yang dapat berakomodasi dengan kaum industriawan, serikat pekerja, teknokrat, penanam modal asing dan kalangan militer. Di samping itu pemerintah harus cukup kuat dan cukup mandiri untuk mengatasi kepentingan kelas tertentu dalam menerapkan kebijakan yang ditentukan, pemberantasan korupsi, peraturan keuangan dan kontrol terhadap tenaga kerja. Dalam keadaan seperti sekarang ini sangat diperlukan kreativitas dari birokrasi untuk mengurangi kesenjangan antara realisasi ekspor dengan potensi ekspor yang seharusnya dapat dicapai karena depresiasi. Mengingat sistem ekonomi sangat tergantung pada kerangka institusional mau tidak mau sistem itu akan melibatkan peran birokrasi dan administrasi. Sementara itu pembahasan masalah efisiensi birokrasi dan administrasi tidak terlepas dari pembahasan peran Pemerintah dalam menyediakan barang publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, fungsi alokasi pemerintah tidak efisien. Hal itu merupakan kegagalan Pemerintah yang disebabkan beberapa hal antara lain, keterbatasan informasi, pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, serta hambatan dalam proses politik antara eksekutif dan legislatif yang biasa di dalamnya terjadi *asymmetric information* yang pada umumnya eksekutif lebih tahu betul mengenai manfaat dan biaya (*well informed*) sedangkan legislatif tidak.

Berbagai upaya pengembangan perlu dilakukan termasuk birokrasi. Birokrasi diartikan sebagai berbagai departemen atau biro yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh Pemerintah. Sedangkan biro-biro yang terlibat tidak bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Gaji yang dibayarkan pada birokrat (orangnya) tidak berkaitan langsung dengan yang dihasilkannya, sehingga birokrat tidak perlu tergantung pada

jumlah atau mutu pelayanan yang merupakan produk yang dihasilkannya. Sementara itu biro-biro yang ada akan saling bersaing memanfaatkan sumber daya ekonomi tersebut. Hal yang sangat penting dalam kaitan birokrasi ini adalah mengubah pola pikir lama yang tidak produktif ke arah pola pikir baru yang tidak terkotak-kotak, komprehensif, produktif dan efisien. Egoisme sektoral-regional yang selama ini menjadi pola dasar kebijakan harus segera ditinggalkan. Perilaku birokrasi yang mestinya berorientasi melayani harus lebih ditingkatkan lagi. Efisiensi birokrasi juga menghendaki perampingan birokrasi yang signifikan.

Kondisi di atas membuka peluang bagi pengembangan sumber daya yang dimiliki. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan dan identifikasi sumber daya pada tingkat regional, baik mencakup sumber daya manusia, budaya, sumber daya alam, keuangan maupun infrastruktur. Identifikasi juga harus dilakukan atas hubungan perilaku antar sumber daya tersebut. Dengan kata lain, mengetahui dan memahami potensi yang ada sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki dalam wahana persaingan ketat pada masa yang akan datang. Dalam konteks optimalisasi pengembangan potensi daerah itu pula, perlu dipikirkan tentang merancang otonomi daerah, bukan pada daerah tingkat II (kabupaten) melainkan pada daerah tingkat I (provinsi)

Diberlakukannya otonomi daerah dipandang oleh berbagai kalangan sebagai berkah sekaligus bahaya. Berkah, karena memberikan kewenangan daerah untuk tumbuh dan berkembang. Tidak seperti masa lalu, dimana daerah hanya diperas untuk kepentingan pusat. Di sisi lain, otonomi daerah mengandung bahaya. Ketidaksiapan daerah dalam melaksanakan otonomi akan menjadi bumerang yang menghancurkan daerah itu sendiri. Saat ini, fakta ketidaksiapan melaksanakan otonomi daerah merupakan fenomena yang mudah sekali terlihat di tengah masyarakat. Logika ketidaksiapan tersebut juga merupakan logika

sederhana, yaitu karena 32 tahun dikungkung oleh pemerintahan pusat orde baru. Contoh gamblang ketidaksiapan tersebut adalah minimnya DPRD tingkat I dan II dalam mengeluarkan peraturan daerah. Tidak jelasnya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan, atau rekrutmen dan *positioning* pegawai negeri yang tidak berdasarkan keahlian.

Dalam perspektif seperti itu, dapat dibayangkan betapa besar bahaya yang mengancam daerah. Berkah yang seharusnya menjadi 'madu' pengantar menuju pertumbuhan dan perkembangan, justru menjadi 'racun' yang menghancurkan dan membunuh. Salah satu unsur penting yang diharapkan membantu menghilangkan atau minimal mengurangi bahaya pelaksanaan otonomi daerah adalah pembiayaan daerah. Kemampuan daerah dalam membiayai dirinya sendiri, diharapkan menjadi akselerator kesiapan daerah menuju daerah yang mandiri. Dengan pembiayaan yang memadai, daerah mampu mempertahankan sumber daya manusia yang ada untuk bekerja pada tingkat efisien, tanpa atau dengan tingkat kebocoran yang rendah. Sekaligus mengerjakan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan semangat yang tinggi, serta pada saat yang sama berusaha mencapai kualitas kerja sebaik mungkin.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, terdapat undang-undang nomor 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Substansi undang-undang tersebut adalah adanya berbagai kemungkinan sumber pembiayaan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah. Dengan adanya UU nomor 25/1999 ini, tidak berarti tidak terdapat permasalahan pembiayaan daerah. Justru masih terdapat permasalahan-permasalahan serius yang harus dipecahkan untuk dapat merealisasikan pembiayaan daerah yang mandiri. Permasalahan tersebut antara lain *pertama*, selama ini daerah telah terbiasa dengan UU No 5 tahun 1974 mengenai

pemerintahan daerah dan PP No 5 tahun 1974 mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berbagai kebijakan *ad hoc* untuk menutupi kelemahan peraturan yang lama. Adanya undang-undang otonomi daerah yang baru, menyebabkan terjadinya perubahan terhadap aturan-aturan yang lama. Misalnya tidak ada lagi SOD (sumbangan otonomi daerah), dana inpres, atau dana reboisasi. Perubahan tersebut akan berakibat pada model penyusunan APBD yang lama. *Kedua*, pada faktanya, mengandalkan pembiayaan dari pendapatan asli daerah, sangat mustahil. Studi yang dilakukan Siddik (1999) menunjukkan bahwa dari 27 propinsi di Indonesia, hanya DKI Jaya yang PAD-nya 60% APBD. Propinsi yang lain jauh lebih rendah dari angka itu. *Ketiga*, dan sisi perimbangan keuangan pusat dan daerah, hal ini sangat tergantung dari kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah. Perimbangan keuangan tersebut berasal dari pajak dan kekayaan alam seperti sumber daya alam hutan, tambang minyak dan gas, atau pertambangan lainnya. Pajak jelas tidak mungkin diandalkan seperti telah dijelaskan pada poin 2, maka perimbangan keuangan dari kekayaan alam dapat menjadi harapan. Namun, kekayaan alam yang ada tidak merata di berbagai daerah di Indonesia, oleh karenanya mengandalkan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah juga merupakan masalah. *Keempat*, pinjaman daerah. Meskipun merupakan suatu kemungkinan pembiayaan daerah, perlu dipikirkan lagi, terutama berkaitan dengan negoisasi pinjaman, yang merupakan *win-win solution*. Fakta bahwa pinjaman yang dilakukan negara telah memberatkan masyarakat, jangan sampai menjadi wabah yang menjangkiti daerah.

Struktur ekonomi Indonesia selama 32 tahun yang dibangun dengan utang ternyata sangat rapuh. Hal itu dapat ditunjukkan dari akumulasi utang luar negeri yang 60% di antaranya merupakan utang swasta. Kondisi lain yang memperburuk situasi perekonomian Indonesia antara lain banyaknya bahan

impor, tingkat suku bunga yang tinggi dan depresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tergantung pada perekonomian global. Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka *index of openness* yang menggambarkan rasio antara ekspor dan GNP suatu negara. Jika kita perhatikan lebih jauh ketergantungan ekspor atas bahan baku impor yang begitu tinggi. Mendasarkan data ekspor impor 1996-1997, pengaruh kenaikan kurs terhadap impor Indonesia sangat kecil sementara pengaruhnya terhadap ekspor tidak nyata bahkan cenderung negatif (Setiadji, B. 1997). Dengan demikian sekalipun ada depresiasi rupiah ada sebagian barang-barang ekspor yang dapat dikembangkan tetapi secara keseluruhan kemungkinan besar ekspor kita akan menurun atau lebih lambat. Dampak yang dapat dirasakan bagi perekonomian Indonesia tentu akan tergantung pada daya tahan ekonomi kita.

PANDANGAN TERHADAP KUALITAS

Berkaitan erat dengan peran sektor industri dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa aspek yang mempengaruhi prospek perkembangan sektor industri di suatu negara. Aspek-aspek tersebut meliputi kondisi perekonomian internasional, kondisi perekonomian dalam negeri dan kondisi politik dalam negeri (Wilber dan Jameson, 1992). Kondisi perekonomian nasional juga tergantung pada sejauh mana tingkat ketergantungan pada pasar internasional. Ketergantungan terhadap pasar internasional dapat ditinjau dari sumbangan ekspor terhadap PDB. Sedangkan kondisi perekonomian dalam negeri akan dipengaruhi oleh tingkat tabungan, jumlah tabungan domestik, jumlah pinjaman luar negeri, perkembangan lembaga keuangan yang memungkinkan bagi investor asing melakukan investasi, produktivitas dan efisiensi.

Kita harus menyadari bahwa lingkungan tempat hidup kita telah berubah sehingga tidak hanya beradaptasi untuk tetap *survive* tetapi juga harus lebih proaktif dalam menghadapi

perubahan yang dinamis tersebut. Sedikitnya ada empat perubahan yang menentukan mati hidupnya organisasi (Domingo, 1997) yaitu pelanggan yang banyak tuntutan, persaingan yang semakin meningkat, biaya yang semakin mahal, dan ancaman krisis yang mendesak. Alternatif pendekatan yang dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan program antisipasi perubahan adalah strategi FRO. Konsep FRO oleh Noori dan Russel (1995) didefinisikan sebagai berikut : "Kepuasan klien akan mengarah pada kesetiaan klien, yang menurut penelitian baru-baru ini penting untuk profitabilitas jangka panjang".

Selanjutnya, organisasi perlu bersaing dalam lingkungan yang kompetitif dengan berbagai dimensi antara lain dimensi fleksibilitas, waktu, kualitas, dapat diandalkan dan dimensi pelayanan. Dimensi-dimensi

menginginkan sesuatu yang bermutu tinggi maka harus membayar mahal. Dengan demikian jika perusahaan menghasilkan produk yang bermutu tinggi harus dapat dipastikan biayanya mahal. Sebaliknya menurut paradigma baru perusahaan yang benar-benar bermutu adalah perusahaan yang mampu menjual barang dengan harga kompetitif, mampu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar serta mampu menekan biaya karena ada program perbaikan terus menerus.

Domingo (1997) menggambarkan perusahaan yang menerapkan paradigma baru mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, setia dan akhirnya menjadi *maniak*. Pelanggan yang loyal mau membayar lebih, datang lagi dan bahkan membawa teman baru dan pada saat yang sama biaya organisasi bisa lebih efisien karena rendahnya tingkat kegagalan, sedikitnya produk

	Paradigma lama	Paradigma baru
Dasar	economy of scale	economy of time
Qualitas	trade-offs	religion, no-compromise
Organisasi	pelaksana bukan pemikir	pelaksanajuga pcmildr
Asset	berupa barang	berupa SDM
Tujuan utama bisnis	keuntungan	kepuasan konsumen
Jenjang organisasi	memudabkan pimpinan	pemecahan masalah
Aluran dibuat untuk	kelancaran operasional	untuk membantu improvisasi

Sumber: Peter Thigpen, Presentation at Stanibrd School of Business, February 26, 1991 dalam Jeffrey Heifer, 1994. *Competitive Advantage through People*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts

tersebut merupakan dimensi-dimensi yang mendukung peningkatan daya saing keefektifan organisasi (*effectiveness based competition*). Sedangkan dimensi harga merupakan dimensi yang mendukung peningkatan daya saing efisiensi organisasi (*efficiency based competition*). Kedua basis tersebut merupakan formula untuk membentuk daya saing produktivitas organisasi.

Menurut paradigma lama, mutu selalu dikaitkan dengan biaya yang mahal artinya jika

rusak/cacat, rendahnya keluhan pelanggan dan menghasilkan skala ekonomi yang efisien. Peningkatan profit bukan tujuan akhir perusahaan. Peningkatan *profit* harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perolehan atas kualitas melalui investasi jangka panjang dalam program perbaikan yang terus-menerus. Keberhasilan sektor bisnis maupun sektor publik yang didukung manajemen proyek akan ditentukan oleh manajemen yang tangguh yang secara proaktif mengantisipasi perubahan (Pelers 1989, Pinto dan Slevl 1987)

OTONOMI DAERAH

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemantapan otonomi daerah melalui upaya pembangunan yang dilaksanakan masyarakat (Gunawan Sumodiningrat, 1999) adalah:

1. Penyertaan masyarakat sejak awal dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan karena merekalah yang melaksanakan, memanfaatkan dan menikmati serta memelihara agar berkelanjutan
2. Setiap program harus dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat, menambah pendapatan dan meningkatkan mutu kehidupan
3. Pendampingan bagi program-program pemberdayaan masyarakat perlu memilih dan menerapkan prinsip kepedulian dan pemahaman mengenai misi untuk membantu masyarakat termasuk melatihnya dan mempersiapkannya
4. Aparat daerah harus lebih siap dalam proses penyiapan masyarakat lokal
5. Pembangunan bagi desa tertinggal dan yang terpuruk akibat dampak krisis tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan misi tujuan dan pendekatan lintas sektoral dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Di sebagian besar negara, desentralisasi merupakan refleksi proses reformasi politik dan ekonomi. Perubahan politik terutama di negara-negara berkembang pada dekade terakhir diwarnai dengan kecenderungan bahwa pelayanan publik menjadi kewenangan tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perubahan teknologi dan integrasi pasar global juga menuntut besaran bentuk pemerintahan yang lebih mampu untuk mengendalikan sistem politik dan ekonomi suatu negara.

Desentralisasi tidaklah mudah didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam. Namun demikian secara umum menurut Studi Bank Dunia yang

dilakukan oleh Rondinelli (1989) sebagaimana dikutip oleh Dillinger (1994) pada dasarnya desentralisasi dikategorikan menjadi empat jenis:

1. *Deconcentration*, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintahan pusat.
2. *Delegation* yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi terkontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian ini biasanya diatur dengan ketentuan perundangan. Pihak yang menerima mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak yang memberi wewenang (*sovereign-authority*)
3. *Devolution*, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pusat.
4. *Privatization*, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi organisasi tersebut untuk ikut ambil bagian secara nyata dalam proses pembangunan nasional.

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Oates (1972), Breton (1996) dan Weingast (1995) sebagaimana dikutip oleh Litvack et.al (1989) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum. Hal ini sangat logis karena *pertama*, pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya. *Kedua* keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari

masyarakat. *Ketiga*, persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Namun demikian, program desentralisasi di Indonesia cenderung tidak sukses. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penghalang bagi kesuksesan program desentralisasi di Indonesia (Smoke & Lewis, 1996). *Pertama*, tidak adanya kerangka institusi yang baik untuk mendukung program (pembangunan) ini. Institusi-institusi yang terlibat dalam program-program di atas sangat terfragmentasi dan cenderung ruwet, dalam arti tidak adanya koordinasi yang jelas. Terutama sekali karena kurang adanya definisi yang jelas mengenai peran masing-masing institusi. Bahkan pada tingkat departemen pun terdapat perbedaan persepsi akan makna desentralisasi.

Kedua, masalah institusional di atas diperparah oleh kepentingan donor yang bekerja sama dengan departemen-departemen yang memungkinkan mereka memutar dana dengan cepat. Hal demikian akan membuat membuat mereka agak kurang tertarik dengan upaya desentralisasi murni yang bisa berakibat berkurangnya kontrol mereka atas alokasi sumberdaya. *Ketiga*, sedikitnya insentif untuk daerah untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dalam program-program tersebut dan tidak bekerjanya mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menekan agar kebutuhan mereka dipenuhi. Hal ini ditambah dengan kurangnya kemampuan daerah di bidang-bidang teknis, administrasi, dan keuangan, membuat manfaat desentralisasi sulit untuk direalisasikan.

PENUTUP

Selama beberapa dekade terakhir di seluruh dunia memang ada kecenderungan bergesernya wewenang dan tanggung jawab pengeluaran (sampai tahap tertentu, tanggung jawab pengumpulan pendapatan) kepada pemerintahan daerah. Kecenderungan ini timbul baik di negara-negara yang punya tradisi sentralistik

yang cukup lama maupun di negara-negara federal, baik di negara-negara berkembang maupun industri. *Devolusi* ini sebenarnya pencerminan dari evolusi politik ke arah pemerintahan yang lebih demokratis yang mencoba untuk memperbaiki akuntabilitas dan kepekaan dari para pemimpin terhadap keinginan rakyatnya. Perkembangan politik suatu negara memang terkait erat dengan pengembangan sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah di negara tersebut (Devas, 1989).

Sistem pengembangan yang perlu ditindaklanjuti adalah pengembangan sumber daya serta sistem birokrasi dan administrasi secara optimal dan mengembangkan kontrol yang efektif. Perkembangan ekonomi pada era globalisasi abad ke-21, mengamanatkan kepada seluruh elemen pelaku pembangunan untuk memiliki visi yang jelas dalam langkah-langkahnya. Langkah-langkah *visioner* tersebut, memungkinkan kita untuk tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi dunia yang begitu cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick, (1989), *Financing Local Government in Indonesia*, Ohio University Press, Athens Ohio)
- Domingo, R.T., (1997), *Quality means Survival: Caveat Venditor Let the Seller Beware*. New York: Prentice Hall
- Dillinger, William, 1994, *Urban Management Program: Decentralization and its Implications for Urban Service Delivery*. The World Bank, Washington, DC
- Noori, H and Russel, R., (1995), *Production and Operation Management: Total Quality and Responsiveness*. New York: McGraw Hill, Inc.
- Peters, T. (1989), *The Shape of the Winner a California Limited Partnership*, California.
- Pinto, J.K. & Seven, DP (1987), *Critical Factor in Successful Project Implementation*.

IEEE Transaction on Engineering Management EM-34 22-27

Peter Thigpen, (1991), Presentation at Stanford School of Business, February 26, dalam Jeffery Pfeiffer, (1994), *Competitive Advantage through People*, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Smoke, Paul dan Blanc D. Lewis (1996) *Fiscal*

Decentralization in Indonesia; A New Approach to an Old Idea, World Development, Vol 24 No 8. Pp 128 1-99.

Wilber, Charles K. & Kenneth P. Jameson, (1992), *The Political Economy of Development and Under Development*, McGraw Hill, Inc.